

KONSTRUKSI MAKNA PEMBERITAAN ISU DUGAAN KORUPSI PROYEK MANGKRAK DI RADARMOJOKERTO.JAWAPOS.COM (ANALISIS SEMIOTIKA SOSIAL M.A.K. HALLIDAY)

Nestya Indih Mulyana¹, Surokim²

^{1, 2}Universitas Trunojoyo Madura, JL. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia
Email: nestyaindih@gmail.com

Article History

Received: 23-06-2026

Revision: 11-07-2026

Accepted: 13-07-2026

Published: 15-07-2026

Abstract. The stalled Mojopahit Marine Park (TBM) project in Mojokerto City has become an interesting public issue because it involves allegations of irregularities in regional budget management and raises the role of the media in shaping public understanding of an event. Studies on corruption reporting have so far focused more on legal aspects and social impacts, while studies on how local media construct meaning through language choices in reporting are still limited. This study aims to analyze the construction of meaning built by Radarmojokerto.Jawapos.Com in discussing the alleged corruption in the TBM project. The study uses a constructivist paradigm with a descriptive qualitative approach based on M.A.K. Halliday's social semiotic theory which includes the field of discourse, the tenor of discourse, and the means of discourse (mode of discourse). Data were obtained through the analysis of 15 news texts from February–October 2025, in-depth interviews with editors, and documentation analyzed using triangulation. The research findings show that the media construct the TBM issue as a matter of alleged misappropriation of public funds, presenting a discursive relationship between public supervisors, law enforcement, and local governments, and employing linguistic strategies such as metaphor, personification, hyperbole, and euphemism to reinforce the news message. These findings demonstrate that local media not only convey facts but also contribute to shaping social reality through the practice of linguistic representation.

Keywords: Meaning Construction, M.A.K. Halliday's Social Semiotics, Alleged Corruption, Stalled Project, Local Media.

Abstrak. Proyek mangkrak Taman Bahari Mojopahit (TBM) di Kota Mojokerto menjadi isu publik yang menarik karena melibatkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran daerah dan memunculkan peran media dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa. Kajian mengenai pemberitaan korupsi selama ini lebih banyak menyoroti aspek hukum dan dampak sosial, sementara kajian mengenai bagaimana media lokal mengonstruksi makna melalui pilihan bahasa dalam pemberitaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi makna yang dibangun oleh Radarmojokerto.Jawapos.Com dalam mewacanakan dugaan korupsi proyek TBM. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teori semiotika sosial M.A.K. Halliday yang meliputi medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan sarana wacana (*mode of discourse*). Data diperoleh melalui analisis 15 teks berita periode Februari–Oktober 2025, wawancara mendalam dengan redaksi, serta dokumentasi yang dianalisis menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media mengonstruksi isu TBM sebagai persoalan dugaan penyimpangan anggaran publik, menghadirkan relasi wacana antara pengawas publik, aparat hukum, dan pemerintah daerah, serta menggunakan strategi kebahasaan seperti metafora, personifikasi, hiperbola, dan eufemisme untuk memperkuat pesan pemberitaan. Temuan ini menunjukkan bahwa media lokal tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi turut membentuk realitas sosial melalui praktik representasi bahasa.

Kata Kunci: Konstruksi Makna, Semiotika Sosial M.A.K. Halliday, Dugaan Korupsi, Proyek Mangkrak, Media Lokal.

How to Cite: Mulyana, N. I & Surokim. (2026). Konstruksi Makna Pemberitaan Isu Dugaan Korupsi Proyek Mangkrak di Radarmojokerto.Jawapos.com (Analisis Semiotika Sosial M.A.K. Halliday). *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 4066-4078. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6886>

PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat modern, bukan hanya sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam membentuk cara masyarakat memahami suatu realitas sosial. Bungin (2006) menjelaskan bahwa media massa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang mampu menyebarkan pesan secara luas kepada khalayak. Namun, dalam praktiknya, media tidak sekadar memindahkan fakta dari suatu peristiwa ke ruang publik, melainkan melakukan proses pemilihan, penafsiran, dan penyusunan realitas melalui bahasa. Dengan demikian, pemberitaan media selalu memiliki dimensi konstruktif karena realitas yang diterima masyarakat merupakan hasil dari proses representasi tertentu, bukan realitas yang hadir secara utuh dan bebas nilai.

Perkembangan media online semakin memperkuat posisi media sebagai aktor pembentuk opini publik. Kecepatan distribusi informasi memungkinkan suatu isu lokal berkembang menjadi perhatian masyarakat luas dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, media lokal memiliki posisi strategis karena memiliki kedekatan geografis, sosial, dan kultural dengan komunitas yang dilayaninya. Franklin dan Murphy (1998) menjelaskan bahwa media lokal merupakan media yang beroperasi dalam lingkungan tertentu dengan fokus utama pada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kedekatan tersebut menjadikan media lokal tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi kepentingan publik, termasuk dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kedekatan antara media lokal dan lingkungan sosialnya juga menghadirkan persoalan kritis, yaitu bagaimana media membangun posisi, memilih sudut pandang, serta merepresentasikan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu konflik atau isu publik.

Salah satu isu yang memperlihatkan kompleksitas peran media lokal adalah pemberitaan mengenai dugaan korupsi proyek mangkrak Taman Bahari Mojopahit (TBM) di Kota Mojokerto. Proyek pujasera berbentuk kapal Majapahit dengan nilai anggaran sekitar Rp2,5 miliar dari APBD 2023 tersebut menjadi sorotan publik setelah mengalami mangkrak dan disegel oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada Januari 2025 karena adanya dugaan penyimpangan. Audit BPKP Jawa Timur memperkirakan kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar, sementara proses hukum terus berjalan dengan penetapan sejumlah tersangka dan persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, akuntabilitas pemerintah, serta fungsi pengawasan masyarakat melalui media.

Pemberitaan media lokal menjadi penting untuk dikaji karena cara media memilih fakta, menentukan narasumber, serta menggunakan strategi kebahasaan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami persoalan korupsi tersebut. Radarmojokerto.Jawapos.Com sebagai media lokal yang secara intensif memberitakan kasus TBM tidak hanya menyampaikan kronologi peristiwa, tetapi juga membangun pemaknaan tertentu mengenai aktor, konflik, dan nilai yang melekat dalam isu tersebut. Oleh karena itu, kajian terhadap pemberitaan media tidak cukup hanya melihat aspek isi atau frekuensi pemberitaan, tetapi perlu mengungkap bagaimana makna sosial dibangun melalui praktik bahasa.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pemberitaan korupsi umumnya lebih banyak menggunakan pendekatan analisis framing untuk melihat kecenderungan keberpihakan media, penonjolan isu, atau konstruksi citra aktor politik dan institusi (Eriyanto, 2002). Meskipun pendekatan tersebut memberikan pemahaman mengenai strategi pembingkai berita, kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana pilihan bahasa membentuk pengalaman sosial dan makna dalam pemberitaan korupsi pada konteks media lokal masih relatif terbatas. Padahal, bahasa dalam berita tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga memiliki fungsi representasional, interpersonal, dan ideologis yang dapat mengarahkan cara khalayak memahami suatu realitas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan pentingnya penggunaan pendekatan semiotika sosial untuk mengungkap proses konstruksi makna dalam pemberitaan media lokal. Penelitian ini menggunakan teori semiotika sosial M.A.K. Halliday yang menganalisis makna melalui tiga aspek utama, yaitu medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*), dan sarana wacana (*mode of discourse*). Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi melalui hubungan antara konteks sosial, aktor yang terlibat, dan pilihan bahasa yang digunakan media.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan semiotika sosial Halliday untuk menganalisis konstruksi makna media lokal dalam pemberitaan dugaan korupsi proyek pembangunan daerah yang mangkrak. Kajian mengenai hubungan antara bahasa media, konstruksi realitas sosial, dan isu korupsi lokal masih belum banyak dikembangkan, terutama pada konteks media daerah seperti Radarmojokerto.Jawapos.Com. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperluas kajian komunikasi dan analisis wacana media dengan menunjukkan bagaimana media lokal membentuk pemaknaan publik terhadap isu korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi media lokal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan desain penelitian kualitatif deskriptif berbasis analisis teks media. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui penggunaan bahasa, pemilihan narasi, dan representasi aktor dalam pemberitaan. Paradigma konstruktivis memandang realitas sosial bukan sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan tunggal, melainkan sebagai hasil konstruksi melalui proses interaksi, interpretasi, serta konteks sosial dan budaya tertentu (Creswell, 2014). Objek dalam penelitian ini adalah konstruksi wacana media mengenai isu dugaan korupsi proyek mangkrak Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang dibangun oleh Radarmojokerto.Jawapos.Com. Sementara itu, sumber data penelitian berupa teks berita yang diterbitkan oleh Radarmojokerto.Jawapos.Com selama periode Februari hingga Oktober 2025. Sebanyak 15 teks berita dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) berita membahas proyek TBM dan berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran; (2) berita diterbitkan dalam periode penelitian; dan (3) berita memuat unsur konstruksi wacana yang dapat dianalisis melalui pendekatan semiotika sosial M.A.K. Halliday.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi teks, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi teks dilakukan dengan membaca secara intensif, mencatat, dan mengidentifikasi unsur kebahasaan serta konstruksi makna dalam berita yang dipilih. Wawancara mendalam dilakukan kepada Imron Arlado selaku Redaktur Pelaksana dan Manajer Berita Online Radar Mojokerto serta beberapa wartawan yang terlibat dalam proses produksi berita untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan redaksional dalam pemberitaan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip dan tangkapan layar berita sebagai bahan pendukung analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi bagian teks berita yang berkaitan dengan konstruksi isu, aktor, dan strategi kebahasaan. Kedua, data yang telah dipilih dianalisis menggunakan tiga dimensi semiotika sosial M.A.K. Halliday, yaitu: (1) medan wacana (*field of discourse*), untuk mengidentifikasi peristiwa, aktivitas sosial, dan konteks yang dibicarakan dalam pemberitaan; (2) pelibat wacana (*tenor of discourse*), untuk menganalisis posisi, hubungan, serta peran aktor yang ditampilkan dalam teks; dan (3) sarana wacana (*mode of discourse*), untuk mengkaji penggunaan bahasa, struktur penyampaian pesan, serta strategi retorik yang digunakan media dalam membangun makna. Ketiga, hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan mengacu pada teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann untuk memahami bagaimana media

membentuk pemaknaan publik terhadap isu dugaan korupsi TBM. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola konstruksi wacana yang ditemukan.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari teks berita dan hasil wawancara informan, triangulasi teori dengan menggunakan perspektif semiotika sosial Halliday dan konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi teks, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di kantor Jawa Pos Radar Mojokerto yang berlokasi di Jalan R.A. Basuni No. 96, Jampirogo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

HASIL DAN DISKUSI

Medan Wacana (*Field of Discourse*) pada Pemberitaan Isu Dugaan Korupsi Proyek Mangkrak TBM

Analisis medan wacana (*field of discourse*) menunjukkan bahwa Radarmojokerto.Jawapos.Com tidak menyajikan kasus Taman Bahari Mojopahit (TBM) sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian persoalan sosial yang berkembang dari dugaan penyimpangan anggaran hingga pengungkapan praktik korupsi. Pengelompokan 15 berita ke dalam lima fase memperlihatkan bahwa media membangun konstruksi makna secara bertahap melalui perkembangan peristiwa. Dalam perspektif semiotika sosial Halliday, medan wacana tidak hanya berkaitan dengan “apa yang terjadi”, tetapi juga bagaimana suatu aktivitas sosial diberi makna melalui konteks, tujuan, dan kepentingan yang melingkupinya.

Pada fase pertama (Berita 1–3), medan wacana dibangun melalui narasi munculnya dugaan korupsi sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik. Media menempatkan proyek pembangunan Kapal Majapahit bukan semata sebagai proyek fisik yang gagal, tetapi sebagai persoalan penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Pemilihan diksi seperti “uang rakyat”, “dugaan korupsi”, dan “pengondisian perkara” menunjukkan adanya proses pemaknaan moral terhadap kasus tersebut. Dalam konteks ini, media menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menempatkan dugaan korupsi sebagai ancaman terhadap prinsip akuntabilitas pemerintahan. Artinya, medan wacana yang dibangun tidak hanya berisi informasi hukum, tetapi juga mengandung nilai evaluatif mengenai hubungan antara negara dan masyarakat.

Pada fase kedua (Berita 4–6), konstruksi medan wacana mengalami perluasan dari persoalan proyek kapal menuju persoalan pengelolaan kawasan TBM secara keseluruhan. Pergeseran fokus ini menunjukkan bahwa media tidak membatasi masalah pada satu objek pembangunan, tetapi menghubungkannya dengan kemungkinan adanya persoalan tata kelola anggaran yang lebih luas. Dalam perspektif Halliday, perubahan medan wacana tersebut memperlihatkan bagaimana konteks aktivitas sosial dalam teks mengalami perluasan. Kasus TBM direpresentasikan bukan hanya sebagai kegagalan pembangunan, tetapi sebagai indikasi lemahnya mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan publik. Fase ketiga (Berita 7–9) memperlihatkan perubahan medan wacana dari tahap pengungkapan dugaan menuju tahap pembuktian melalui proses hukum. Media mulai menampilkan relasi antara aparat penegak hukum, tersangka, dan pihak lain yang diduga memiliki keterlibatan. Kehadiran narasi mengenai tersangka yang tidak memenuhi panggilan, pengajuan *justice collaborator*, serta pemeriksaan sejumlah pihak menunjukkan bahwa media mengonstruksi kasus ini sebagai proses pencarian kebenaran hukum. Pada tahap ini, pemberitaan tidak hanya menggambarkan tindakan individu, tetapi membangun pemahaman bahwa korupsi merupakan persoalan yang melibatkan jaringan relasi sosial dan institusional.

Pada fase keempat (Berita 10–11), medan wacana bergeser pada kegagalan teknis pembangunan. Temuan mengenai kualitas beton yang tidak sesuai standar dan perencanaan proyek yang tidak berbasis kajian teknis memperluas makna kasus dari persoalan administratif menjadi persoalan profesionalitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kerangka semiotika sosial Halliday, unsur medan wacana pada tahap ini menunjukkan bahwa bahasa teknis konstruksi digunakan untuk memperkuat legitimasi pemberitaan. Fakta mengenai kualitas material dan proses perencanaan berfungsi sebagai bukti yang memperkuat konstruksi bahwa mangkraknya proyek bukan sekadar akibat kendala teknis, tetapi berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

Fase kelima (Berita 12–15) menempatkan kasus TBM dalam medan wacana persidangan dan pengungkapan modus korupsi. Pemberitaan mengenai pemeriksaan lokasi oleh majelis hakim, pemalsuan dokumen, penggunaan surat dukungan fiktif, serta aliran dana proyek memperkuat konstruksi bahwa kasus tersebut memiliki dimensi sistemik. Media tidak lagi hanya menggambarkan akibat dari proyek mangkrak, tetapi mengarahkan perhatian publik pada mekanisme yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Dengan demikian, medan wacana yang dibangun berkembang dari isu pembangunan gagal menjadi isu tata kelola pemerintahan dan integritas institusi.

Analisis medan wacana menunjukkan bahwa Radarmojokerto.Jawapos.Com membangun konstruksi realitas melalui proses narasi yang progresif. Kasus TBM tidak direpresentasikan hanya sebagai kegagalan sebuah proyek fisik, tetapi sebagai simbol persoalan akuntabilitas publik, lemahnya pengawasan, dan pentingnya transparansi pemerintahan. Temuan ini memperkuat pandangan Halliday bahwa bahasa dalam teks media berfungsi sebagai praktik sosial yang membentuk cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Dengan demikian, pemberitaan media lokal berperan aktif dalam mengarahkan interpretasi publik terhadap isu dugaan korupsi melalui pemilihan fakta, urutan penyajian peristiwa, dan penekanan makna tertentu.

Pelibat Wacana (*Tenor of Discourse*) pada Pemberitaan Isu Dugaan Korupsi Proyek Mangkrak TBM

Analisis pelibat wacana (*tenor of discourse*) menunjukkan bagaimana Radarmojokerto.Jawapos.Com membangun relasi sosial antara aktor-aktor yang terlibat dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi Taman Bahari Mojopahit (TBM). Dalam perspektif Halliday, pelibat wacana tidak hanya berkaitan dengan siapa yang hadir dalam teks, tetapi juga bagaimana posisi, peran, dan tingkat otoritas setiap aktor dikonstruksi melalui pilihan bahasa. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan representasi antara aktor yang diberikan ruang bicara dan aktor yang cenderung ditempatkan sebagai objek pemberitaan. Aktor yang paling dominan muncul dalam pemberitaan berasal dari dua kelompok utama, yaitu lembaga pengawas publik dan aparat penegak hukum. Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto, khususnya melalui Rif'an Hanum selaku Pembina DPD LP2KP, dikonstruksi sebagai representasi suara masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Kehadiran LP2KP dalam teks tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai aktor yang memberikan penilaian moral terhadap kasus TBM melalui kritik, desakan pengusutan, serta tuntutan transparansi. Posisi ini memperlihatkan bahwa media menempatkan masyarakat sipil sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.

Selain masyarakat sipil, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan KPK juga memperoleh ruang representasi yang kuat. Tokoh-tokoh seperti Kasi Intelijen Joko Sutrisno, Kasi Pidsus Tezar Rachadian, Kepala Kejaksaan Bobby Ruswin, serta unsur pengadilan ditampilkan sebagai aktor yang memiliki kewenangan, kredibilitas, dan otoritas dalam mengungkap fakta hukum. Dalam konstruksi wacana media, keberadaan aparat hukum berfungsi sebagai sumber legitimasi formal yang memperkuat narasi bahwa kasus TBM

merupakan persoalan serius yang sedang diproses melalui mekanisme hukum. Penggunaan pernyataan resmi dari lembaga hukum juga memperkuat posisi media sebagai penyampai informasi yang berbasis pada sumber berotoritas. Namun, analisis pelibat wacana juga menunjukkan adanya aktor tertentu yang tidak memperoleh ruang bicara secara proporsional. Pihak yang diduga terlibat, khususnya unsur Pemerintah Kota Mojokerto dan pihak pelaksana proyek, lebih sering hadir sebagai objek pemberitaan dibandingkan sebagai subjek yang menjelaskan posisi mereka. Ketika nama-nama tersebut disebut dalam berita, representasinya lebih banyak muncul melalui perspektif aparat penegak hukum, hasil penyidikan, atau pernyataan pihak lain. Keterbatasan ruang bagi aktor tersebut untuk menyampaikan klarifikasi menyebabkan perspektif mereka tidak berkembang secara seimbang dalam konstruksi berita.

Ketidakhadiran atau minimnya suara dari pihak yang diberitakan memiliki implikasi penting dalam pembentukan makna. Dalam kajian wacana media, absennya suara tertentu bukan sekadar kekosongan informasi, tetapi dapat menjadi bagian dari strategi representasi karena media secara tidak langsung menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara dan siapa yang hanya menjadi objek pembicaraan. Dalam konteks pemberitaan TBM, dominasi suara masyarakat sipil dan aparat hukum secara bersamaan membangun struktur wacana yang menempatkan satu kelompok sebagai penjaga kepentingan publik, sementara kelompok lain berada dalam posisi yang harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan. Dengan demikian, pelibat wacana dalam pemberitaan Radarmojokerto.Jawapos.Com membentuk relasi sosial yang tidak sepenuhnya netral. Media membangun hierarki suara melalui pemberian ruang yang lebih besar kepada aktor yang dianggap memiliki legitimasi moral dan hukum. Sementara itu, keterbatasan representasi terhadap pihak yang diduga terlibat menyebabkan konstruksi wacana lebih kuat mengarah pada perspektif pengawasan dan penegakan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam proses konstruksi realitas sosial, media tidak hanya menentukan apa yang diberitakan, tetapi juga menentukan siapa yang memperoleh kesempatan untuk mendefinisikan makna atas suatu peristiwa.

Sarana Wacana (*Mode of Discourse*) pada Pemberitaan Isu Dugaan Korupsi Proyek Mangkrak TBM

Analisis sarana wacana dilakukan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan oleh media dalam membangun, memperkuat, maupun membatasi pemaknaan terhadap isu dugaan korupsi proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM). Dalam perspektif semiotika sosial Halliday, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai praktik

sosial yang merepresentasikan pengalaman, hubungan antaraktor, serta kepentingan tertentu dalam suatu konteks komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada bentuk-bentuk gaya bahasa yang memiliki fungsi konstruktif dalam pemberitaan, khususnya metafora, personifikasi, hiperbola, dan eufemisme. Keempat kategori tersebut dipilih karena memiliki peran penting dalam membentuk cara khalayak memahami suatu realitas sosial. Metafora dan personifikasi berperan dalam membangun gambaran tertentu terhadap suatu peristiwa, hiperbola berfungsi memperkuat efek emosional dan penekanan makna, sedangkan eufemisme menunjukkan strategi kehati-hatian bahasa media dalam menyampaikan isu yang berkaitan dengan proses hukum.

Pertama, penggunaan metafora menunjukkan bagaimana media membingkai kasus TBM melalui perbandingan makna yang lebih mudah dipahami oleh publik. Salah satu metafora yang dominan adalah istilah "*bancakan*" untuk menggambarkan dugaan praktik pembagian keuntungan ilegal dalam proyek tersebut. Istilah ini tidak hanya menyampaikan dugaan adanya penyimpangan finansial, tetapi juga membangun representasi moral bahwa proyek publik telah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Selain itu, frasa "*pintu masuk*" yang digunakan untuk menggambarkan kasus kapal TBM sebagai awal pengungkapan persoalan yang lebih luas menunjukkan konstruksi bahwa kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari dugaan permasalahan yang lebih kompleks. Penggunaan metafora tersebut memperlihatkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta hukum, tetapi juga membangun kerangka interpretasi tertentu agar pembaca memahami kasus sebagai persoalan penyimpangan terhadap kepentingan publik.

Kedua, personifikasi digunakan untuk memberikan gambaran konkret terhadap dampak kerugian akibat dugaan korupsi. Kata seperti "*menelan*," "*menyedot*," dan "*menguras*" menggambarkan anggaran negara seolah-olah memiliki kemampuan untuk mengalami tindakan fisik seperti manusia. Strategi bahasa ini membuat konsep kerugian negara yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam konteks konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann, penggunaan personifikasi tersebut berperan dalam membangun pemahaman bersama bahwa kerugian anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan hilangnya hak masyarakat terhadap penggunaan dana publik secara bertanggung jawab.

Ketiga, hiperbola ditemukan pada penggunaan kata seperti "*fantastis*" dalam menggambarkan nilai uang yang berkaitan dengan dugaan pengondisian perkara. Kategori hiperbola dipilih karena bentuk bahasa ini menunjukkan upaya media memberikan penekanan tertentu terhadap besarnya dampak atau tingkat keseriusan suatu peristiwa. Meskipun tidak

mengubah fakta utama dalam berita, penggunaan hiperbola dapat meningkatkan daya tarik emosional pemberitaan dan memengaruhi cara pembaca menilai tingkat urgensi suatu kasus. Dengan demikian, hiperbola menjadi salah satu strategi retorik media dalam memperkuat perhatian publik terhadap isu korupsi yang diberitakan.

Keempat, eufemisme dan penggunaan diksi hukum menunjukkan strategi kehati-hatian media dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik untuk memperoleh informasi dan prinsip praduga tak bersalah. Kata-kata seperti "*diduga*," "*oknum*," dan "*tersangka*" digunakan secara konsisten untuk menunjukkan bahwa proses hukum masih berlangsung dan status seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Pemilihan kategori ini penting dianalisis karena menunjukkan bahwa konstruksi wacana media tidak hanya dibangun melalui bahasa yang menonjolkan suatu peristiwa, tetapi juga melalui batasan-batasan bahasa yang menjaga legitimasi jurnalistik.

Secara keseluruhan, pola penggunaan metafora, personifikasi, hiperbola, dan eufemisme menunjukkan bahwa Radarmojokerto.Jawapos.Com membangun wacana kasus TBM melalui kombinasi strategi ekspresif dan kehati-hatian hukum. Bahasa yang digunakan tidak sekadar menjadi medium penyampaian fakta, tetapi berfungsi sebagai perangkat untuk membangun pemaknaan sosial terhadap kasus korupsi. Melalui pilihan bahasa tersebut, media mengonstruksi realitas bahwa kasus TBM merupakan persoalan publik yang serius, sementara pada saat yang sama tetap mempertahankan posisi jurnalistik dengan menggunakan diksi yang tidak mengabaikan prinsip objektivitas dan praduga tak bersalah.

Konstruksi Realitas Sosial dalam Pemberitaan TBM: Tinjauan Berger dan Luckmann

Apabila ketiga dimensi semiotika sosial tersebut diinterpretasikan melalui teori konstruksi realitas sosial Berger dan Luckmann, proses konstruksi makna dalam pemberitaan Radarmojokerto.Jawapos.Com berlangsung dalam tiga momen yang berkesinambungan. Pada momen eksternalisasi, realitas dibentuk melalui pemilihan isu yang dilandasi fungsi pers sebagai kontrol sosial. Wartawan dan redaksi meyakini bahwa meliput kasus TBM adalah bagian dari tanggung jawab media lokal untuk mengawal penggunaan anggaran publik. Keyakinan ini diperkuat oleh verifikasi langsung di lapangan—meliputi observasi kondisi fisik bangunan mangkrak, hadirnya bukti-bukti konkret seperti rekaman chat dan dokumen pengadaan, serta perkembangan proses persidangan yang terus memberikan bahan pemberitaan baru.

Pada momen objektivasi, realitas tersebut disajikan sebagai fakta yang tampak objektif melalui beberapa strategi. Pertama, pemilihan aktor yang kredibel (pejabat kejaksaan, hakim, ahli teknis) sebagai narasumber utama memberikan kesan bahwa informasi yang disajikan berasal dari sumber yang kompeten dan dapat dipercaya. Kedua, penggunaan kutipan langsung dari persidangan memberikan legitimasi bahwa informasi yang disajikan merupakan fakta yang telah diuji secara hukum. Ketiga, pemilihan judul berita yang provokatif namun tetap menggunakan diksi hukum yang hati-hati memperlihatkan upaya penyeimbangan antara daya tarik pembaca dan kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik. Pada momen internalisasi, realitas yang dikonstruksi diserap oleh publik dan membentuk kesadaran kolektif. Berdasarkan wawancara dengan redaksi, pemberitaan kasus TBM memicu respons yang signifikan dari masyarakat, yang tercermin dalam meningkatnya jumlah pembaca dan komentar pada setiap artikel yang diterbitkan. Secara lebih luas, pemberitaan ini turut membentuk penilaian publik bahwa pemerintah daerah Kota Mojokerto perlu lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan proyek pembangunan.

Temuan paling mendasar dari penelitian ini adalah bahwa proses konstruksi realitas berlangsung justru di tengah keyakinan para jurnalis bahwa mereka semata-mata menyajikan fakta. Pembingkai realitas terjadi secara alamiah melalui rutinitas kerja jurnalistik—mulai dari pemilihan narasumber, penentuan angle berita, penggunaan diksi tertentu, hingga keputusan editorial tentang apa yang diterbitkan dan apa yang tidak. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi sosial media massa bukan merupakan upaya manipulasi yang disengaja, melainkan hasil dari proses produksi berita yang dipengaruhi oleh nilai-nilai profesionalisme, ideologi redaksi, dan konteks sosial-budaya lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Radarmojokerto.Jawapos.Com membangun konstruksi makna terhadap isu dugaan korupsi proyek mangkrak Taman Bahari Mojopahit (TBM) sebagai persoalan publik yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran dan tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan analisis semiotika sosial M.A.K. Halliday, konstruksi tersebut terlihat melalui tiga aspek utama. Pada aspek medan wacana (*field of discourse*), media memosisikan kasus TBM sebagai dugaan penyimpangan penggunaan uang rakyat yang perlu dikawal melalui proses hukum dan pengawasan publik. Pada aspek pelibat wacana (*tenor of discourse*), media membangun relasi makna melalui dominasi suara lembaga pengawas publik dan aparat penegak hukum sebagai aktor yang memperjuangkan transparansi, sementara pihak yang diduga terlibat cenderung tidak memiliki ruang wacana yang setara. Kondisi ini

menghasilkan konstruksi moral yang membedakan posisi antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dan pihak yang diduga melakukan penyimpangan.

Pada aspek sarana wacana (*mode of discourse*), penelitian menemukan bahwa pilihan bahasa melalui metafora, personifikasi, hiperbola, dan eufemisme berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus TBM. Media menggunakan bahasa yang ekspresif untuk memperkuat makna pentingnya kasus tersebut, namun tetap mempertahankan kehati-hatian jurnalistik melalui penggunaan istilah hukum seperti “diduga” dan “tersangka”. Dengan demikian, konstruksi wacana Radarmojokerto.Jawapos.Com tidak hanya terbentuk dari fakta yang diberitakan, tetapi juga melalui proses seleksi aktor, pemilihan sudut pandang, dan strategi penggunaan bahasa. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa media lokal memiliki peran aktif dalam mengonstruksi realitas sosial mengenai isu publik. Dalam konteks kasus TBM, Radarmojokerto.Jawapos.Com tidak sekadar menyampaikan perkembangan hukum, tetapi turut membentuk pemahaman masyarakat bahwa proyek tersebut merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian komunikasi, khususnya analisis wacana media lokal, dengan menunjukkan bahwa pendekatan semiotika sosial Halliday dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana makna sosial dibangun melalui praktik pemberitaan.

REFERENSI

- Akhidani, M. A. (2023). Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday Pemberitaan Perang Sudan di Media Online Kompas.Com dan Detik.Com. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7884–7897.
- Anggraini, A. P. (2020). Konstruksi Realitas Media Massa Dan Budaya Populer. *Mediakom: Jurnal Media Komunikasi*, 10(2), 164–171.
- Ardial, H. (2022). Paradigma dan model penelitian komunikasi. Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2011). Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi Dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. H. (2008). Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat. Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Efendi, E., Siregar, I. M., & Harahap, R. R. (2023). Semiotika Tanda dan Makna. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), 154–163.
- Eriyanto. (2002). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. LKiS.
- Eriyanto. (2007). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. LKiS Pelangi Aksara.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79–86.
- Halliday, M.A.K. & Hasan, R. (1994). Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasan dalam Pandangan Semiotika Sosial. Gadjah Mada University Press.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi realitas politik dalam media massa. Yayasan Obor Indonesia.

- Hetami, A. A., & Aransyah, M. F. (2020). Investigation of Corruption Prevention Plan In Construction Industries. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 51–64.
- Ismandianto, I., & Isnaini, I. (2020). Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday Pemberitaan Kontroversi Kafir di Media Online. *Komunikasiana: Journal of Communication Studies*, 2(2), 97.
- Lantowa, J., Marahayu, N. M., & Khairussibyan, M. (2017). *Semiotika: Teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra*. Deepublish.
- Mustikasari, R., Zakiah, K., & Rantona, S. (2022). Strategi Manajemen Komunikasi Media Online Cerdik Indonesia Dalam Mengatasi Persaingan Antarmedia Online. *Jurnal Common*, 5(2), 192–200.
- Nur Arifin, T. S. (2023). Media Massa dan Proses Konstruksi Realitas dalam Kajian Teori Sistem dan Differensiasi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 132–142.
- Prastya, N. M., & Ningsih, I. N. D. K. (2021). Manajemen Redaksi Media Lokal dalam Pemberitaan Haji. *ETTISAL: Journal of Communication*, 6(1), 127.
- Ramadhan, H. F. (2022). Islamofobia dan Konstruksi Media Online: Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday pada Pemberitaan Media Online Barat Mengenai Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022. Institut STIAMI, Jakarta.
- Rivers, W. L. (2004). *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Erlangga.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Santoso, A. (2008). Jejak Halliday dalam linguistik kritis dan analisis wacana kritis. *Jurnal Bahasa dan Seni*, 36(1), 1–14.
- Sari, A. K., Sari, S., & Risdiyanto, B. (2018). Analisis Semiotika Sosial Pemberitaan Kasus Korupsi E-KTP di Situs Liputan6.Com. *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 4(1).
- Sari, A. V., Pariyasto, S., & Marpaung, M. S. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk terhadap Kasus Korupsi pada Media Online detik.News. *Adjektiva: Educational Languages and Literature Studies*, 7(2), 50–58.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, E. H. (2020). Dinamika Media Massa Lokal dalam Membangun Demokratisasi di Daerah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 117–127.
- Turistiati, A. T. (2017). Pemberitaan Bangkitnya PKI dalam Media Massa (Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday). *Lugas*, 1(01), 55–67.
- Yoserizal, M. (2018). Media Massa dan Jurnalisme: Kajian Pemaknaan Antara Media Massa Cetak dan Jurnalistik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 5(5), 81–92